

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

3D Kebendaharaan Negara, 2011, *Pengelolaan Barang Milik Negara (Buku 2)*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Hadisoeparto, Hartono, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016, *Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Perumahan MODUL 17 Pengelolaan Barang Milik Negara*. Bandung: Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kusumaatmadja, Mochtar, B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku 1)*, Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Masriani, Yulis Tiena, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

JURNAL/MAKALAH

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No.1, Januari-Maret, 2014.

Eva Cynthia Arlina D, 2016. Analisis Prosedur Penilaian Barang Milik Negara Berupa Bangunan Pada Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (KNKPL) Yogyakarta. *Tugas Akhir*, Sekolah Vokasi Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Mhd. Habibi Arifin, 2011. Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Negara) Pada Kantor DINas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. *Skripsi*, Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim. Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817).

LAIN-LAIN

Citro Atmoko. 2018. Hasil revaluasi, nilai barang milik negara naik jadi Rp 5.728,49 triliun di <https://www.antarane.ws.com/berita/760589/hasil-revaluasi-nilai-barang-milik-negara-naik-jadi-rp572849-triliun/>, diakses pada 11 April 2019.



Humas, “Nilai Aset Negara Rp 5.285 Triliun, Menkeu: Jangan Hanya Mengklaim, Tapi Kelola Dengan Baik”, <https://setkab.go.id/nilai-aset-negara-rp-5-285-triliun-menkeu-jangan-hanya-mengklaim-tapi-kelola-dengan-baik/>, diakses pada 10 April 2019.

Joko Nurcahyo, “Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”, <https://jokonurcahyo.wordpress.com/2011/07/28/asas-pengelolaan-barang-milik-negaradaerah/>, diakses pada 29 Desember 2019.

Murti Ali Lingga, “Aset Negara Bukan Hanya Tertib, Tapi Harus Dioptimalkan”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/07/125055226/aset-negara-bukan-hanya-tertib-tapi-harus-dioptimalkan>, diakses pada 29 September 2019.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, “Sejarah Pengadilan Tinggi Yogyakarta”, <https://pt-yogyakarta.go.id/site/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html>, diakses pada 29 September 2019.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, “Struktur Organisasi”, https://pt-yogyakarta.go.id/site/other/struktur_organisasi.html, diakses pada 29 September 2019.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, “Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)”, <https://pt-yogyakarta.go.id/site/link/201407012026051780853b2b6ed1d671.html>, diakses pada 29 September 2019.



Wheni, “Manajemen Barang Milik Negara: Cermin Peradaban Bangsa”,

<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa>, diakses pada 10 April 2019.

Yuliyanna Fauzi. 2018. Sri Mulyani: Nilai Barang Milik Negara Tembus Rp 2.188 triliun, di

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170829105300-78-238025/sri-mulyani-nilai-barang-milik-negara-tembus-rp2188-triliun/>, diakses pada 11 April 2019.

Murti Ali Lingga, “Aset Negara Bukan Hanya Tertib, Tapi Harus Dioptimalkan”,

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/07/125055226/aset-negara-bukan-hanya-tertib-tapi-harus-dioptimalkan>, diakses pada 29 September 2019.